

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Smart City adalah konsep perencanaan kota yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat hidup yang lebih mudah dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital di dalam sebuah komponennya, dengan tujuan mempermudah penyampaian informasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan *Smart City* seperti :

1. Jonathan (2006), menurutnya *Smart City* adalah pengembangan kota yang didasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dimana informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah, sektor bisnis, masyarakat, dan potensi lokal tersebut.
2. Menurut Abdoulevv (2011), *Smart City* adalah sebuah kota yang mengintegrasikan konsep digital, alam, dan sosial untuk menciptakan peningkatan dalam ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang ramah, sistem transportasi yang efisien, dan kualitas hidup yang baik.
3. Dradak (2014) menyampaikan bahwa *Smart City* (kota cerdas) pada dasarnya memanfaatkan teknologi untuk membuat kota lebih pintar dan efisien dalam penggunaan sumber daya, sehingga dapat menghemat biaya dan energi.
4. Hasibun & Sulaiman didalam (Tri & Aindita. 2021:3) menjelaskan bahwa konsep *Smart City* dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak bagi lingkungan perkotaan kearah yang lebih nyaman dan efisien.

Maka dari itu *Smart City* dapat di artikan secara sederhana sebagai kota pintar yang dapat memberikan kualitas hidup yang baik dan kenyamanan untuk masyarakatnya. *Smart City* merupakan perencanaan, pengelolaan dan penataan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, untuk mendukung masyarakat yang cerdas juga meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Smart City atau kota pintar juga akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kabupaten Batang merupakan daerah yang terus berkembang, dengan mengambil langkah strategis dalam mengadopsi konsep *Smart City* sebagai upaya untuk modernisasi tata kelola pemerintahan. Kabupaten Batang termasuk bagian dari program gerakan menuju 100 *Smart City* sudah dari tahun 2018. Implementasi *Smart City* yang telah di capai oleh pemerintah Kabupaten Batang yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Tabel 1.1 Pencapaian Program *Smart City* di Kabupaten Batang
Tahun 2022

No.	Program <i>Smart City</i>	Capaian
1.	<i>Smart Governance</i>	89,7 %
2.	<i>Smart Branding</i>	85,7 %
3.	<i>Smart Economy</i>	80 %
4.	<i>Smart Living</i>	83,3 %
5.	<i>Smart Society</i>	83,3 %
7.	<i>Smart Environment</i>	100 %

Sumber: <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9787>,
Diakses pada 19 Mei 2025.

Pencapaian program *Smart City* di Kabupaten Batang pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang beragam pada setiap komponennya. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa *Smart Environment* menjadi komponen dengan capaian tertinggi, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program yang terkait dengan lingkungan seperti penggalakan *Urban Farming*, pengembangan *Urban Tourism*, serta pembangunan IPAL Komunal dan taman kota. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi yang berorientasi lingkungan.

Akan tetapi pencapaian pada komponen lain seperti *Smart Governance* (89,7%), *Smart Branding* (85,7%), *Smart Economy* (80%), *Smart Living* (83,3%), dan *Smart Society* (83,3%) masih belum mencapai angka maksimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya sejumlah kendala dan tantangan yang menghambat optimalisasi implementasi program *Smart City* secara menyeluruh.

Dalam aspek *Smart Governance*, meskipun terdapat upaya penyusunan masterplan *e-Government* yang meliputi kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM/ASN), infrastruktur jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta kerja sama antar pemerintah (G2G), efektivitas dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi masih memerlukan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas SDM yang belum sepenuhnya siap mengelola sistem digital secara optimal, serta kendala teknis dalam pengembangan infrastruktur *IT* yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Pada komponen *Smart Branding*, meskipun terdapat pengembangan industri menengah dan besar melalui jaminan pemerintah (*government guarantee*) serta pengembangan marketplace untuk produk UMKM dan IKM, pencapaian di angka 85,7% menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses pasar yang masih dirasakan pelaku UMKM, serta kurangnya promosi dan pendampingan yang intensif untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Smart Economy yang berada pada capaian 80% juga menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis teknologi informasi dan pariwisata belum sepenuhnya maksimal. Faktor penghambat utama antara lain masih terbatasnya integrasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital serta infrastruktur pendukung yang belum merata, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan.

Selain itu, *Smart Living* dengan capaian 83,3% menandakan bahwa upaya pemerataan pembangunan, khususnya melalui konsep *small town* yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, belum sepenuhnya tercapai secara merata. Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, sehingga perlu strategi yang lebih

adaptif dan inklusif. Begitu juga dengan *Smart Society* yang capaian 83,3%, di mana pengembangan keamanan kota melalui *CCTV*, kolaborasi antar komunitas, pemerintah, dan swasta, serta bantuan pendidikan masih menghadapi kendala seperti pembiayaan, koordinasi, dan partisipasi aktif masyarakat yang belum optimal.

Secara keseluruhan, capaian yang belum maksimal pada beberapa komponen tersebut menggambarkan bahwa meskipun Kabupaten Batang telah melakukan berbagai inovasi dan program yang baik dalam implementasi *Smart City*, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Hal ini menjadi latar belakang penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program *Smart City*. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan keberlanjutan program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Batang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas-dinas terkait seperti, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berperan sebagai pemimpin program *Smart City*. Selain itu terdapat sektor-sektor swasta yang ikut turut mendukung pengembangan infrastruktur dan juga inovasi teknologi. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut aktif berpartisipasi sebagai pengguna dan juga pemberi masukan terhadap program *Smart City* tersebut.

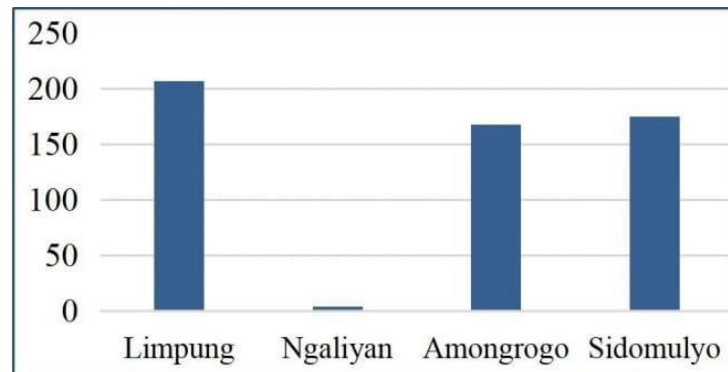
Akan tetapi perjalanan menuju *Smart City* yang sempurna di Kabupaten Batang tidak terlepas dari sebuah tantangan. Di mana salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah terpencil yang masih belum terjangkau internet. Selain itu literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan dalam pengoptimalan penggunaan teknologi. Pemerintah daerah Kabupaten Batang juga harus menghadapi keterbatasan anggaran dan terus memastikan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan juga masyarakat untuk mendukung program tersebut.

Pemerintah juga terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan di tingkat desa melalui sebuah kebijakan yang adaptif terhadap teknologi informasi

dan komunikasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah Program *Smart Village* yang merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik pemberdayaan masyarakat desa. Konsep ini menekankan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan juga untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas pelayanan yang selama ini menjadi persoalan klasik di pemerintahan desa. Kabupaten Batang, menjadi salah satu daerah yang mengadopsi Program *Smart Village* melalui Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Smart Village*.

Desa Limpung yang memiliki sebuah potensi dan juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di banding desa lainya yang ada di Kecamatan Limpung, seperti pada data di bawah ini:

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Limpung
Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat di ketahui bahwa Desa Limpung memiliki laju pertumbuhan penduduk yang signifikan diantara desa lainya di Kecamatan Limpung. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Desa Limpung mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk yang berkembang pesat di setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan peningkatan aktivitas masyarakat baik dari segi sosial dan juga ekonomi, dimana dalam hal ini maka dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk ini memberikan tantangan tersendiri didalam pengelolaan sumber daya, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai (Haniyuhana & Widiyarta, 2023).

Desa Limpung terletak di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Desa yang letaknya setrategis karena berada di pertemuan arus mobilitas dari Batang pegunungan dan wilayah Batang pesisir. Letaknya yang setrategis di tepi jalan utama penghubung antara kecamatan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Menurut Saragih (2019), letak geografis dan aksesibilitas sebuah desa sangat berpengaruh terhadap potensi desa tersebut. Sedangkan menurut Putra (2017), desa yang memiliki akses yang baik terhadap pusat administrasi dan jalur perdagangan cenderung lebih cepat berkembang.

Desa Limpung juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, karena berdekatan dengan alun-alun di pusat kota, pasar, dan juga terminal. Sebagai kawasan pusat perdagangan wilayah Batang timur, menjadikan Desa Limpung terus berkembang perekonomiannya. Dengan kegiatan perekonomian yang ramai simpul-simpul pemberdayaan terus muncul. Kemunculan ini di tandai dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di alun-alun. Penduduk Desa Limpung pada umumnya bekerja sebagai petani dan bekerja pada bidang industri emping melinjo. Produksi emping melinjo ini sudah mencakup skala jawa.

Dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai, akses internet, dan juga adanya potensi ekonomi lokal berkembang pesat, maka Desa Limpung terpilih menjadi *Pilot Project* atau desa percontohan dalam program *Smart Village* di Kabupaten Batang. *Smart Village* ini merupakan turunan dari *Masterplan Smart City* yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022, dimana konsep ini mencakup enam dimensi utama yaitu:

1. *Smart Governance*: Pemerintah berbasis digital dan transparan.
2. *Smart Economy*: Pengembangan ekonomi lokal menggunakan sebuah teknologi.
3. *Smart Society*: Peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat.
4. *Smart Living*: Mewujudkan lingkungan yang nyaman.

5. *Smart Environment*: Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

6. *Smart Mobility*: Peningkatan aksesibilitas dan juga transportasi.

Dengan fokus program tersebut adalah digitalisasi pelayanan, yaitu sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi seperti *websait* desa. Setelah itu peningkatan ekonomi lokal dengan menerapkan program *one village one product* (OVOP). Dan pemanfaatan lingkungan seperti pemanfaatan energi terbarukan, juga pengelolaan limbah ramah lingkungan.

Tabel 1.2 Desa Percontohan Program *Smart Village*
di Kabupaten Batang Tahun. 2018

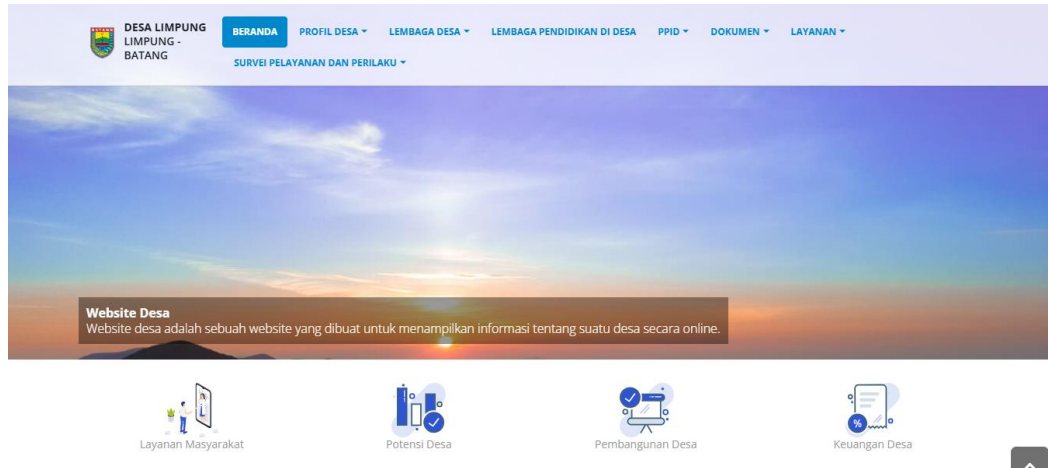
No.	Kecamatan	Desa atau Kelurahan
1.	Batang	Watusalit, Kesepuhan, Karangasem Utara, Kauman, Proyonongo Selatan, Proyonongo Tengah, Sambong
2.	Warungasem	Warungasem, Cepangan, Sariaglagah
3.	Wonotunggal	Wates, Siwatu, Brokoh,
4.	Bandar	Bandar, Kluwih, Tumbrep
5.	Blado	Blado, Selopajang Barat, Kembanglangit, Kambangan
6.	Reban	Reban, Tambakboyong, Ngroto
7.	Bawang	Bawang, Sangubayu, Candigugur, Surjo, Candirejo
8.	Tersono	Tersono, Plosowangi, Karang, Rejosari Barat, Rejosari Timur
9.	Gringsing	Mentosari, Krengseng, Gringsing
10.	Limpung	Limpung, Sidomulyo, Amongrogo, Ngalian
11.	Subah	Subah, Kemiri Barat, Kalimangis, Keboangan
12.	Tulis	Tulis, Wringingintung, Simbangdesa, Kaliboyo
13.	Kandeman	Kandeman, Botolambat
14.	Banyuputih	Banyuputih, Sembung, Timbang, Kalibalik
15.	Pecalungan	Pecalungan, Selokerto

Sumber: *Sumber: <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9787>, Diakses pada 19 Mei 2025.*

Desa Limpung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Limpung, yang terdiri dari empat desa yaitu Sidomulyo, Amongrogo, dan juga Ngaliyan yang ditetapkan menjadi *Pilot Project* atau desa percontohan penerapan program *Smart Village* di Kabupaten Batang pada tahun 2018. Sebagai desa percontohan atau *Pilot Project* Desa Limpung menjadi perhatian di dalam implementasi kebijakan berbasis data atau *evidence based policy* untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Desa Limpung ini diharapkan bisa menjadi model pengembangan desa yang berbasis bukti dan dapat direalisasikan di desa-desa lainya, baik di Kecamatan Limpung ataupun wilayah di Kabupaten Batang.

Dalam implementasinya, Desa Limpung telah berhasil menerapkan komponen *smart village* seperti *smart governance*. Pada dasarnya *smart governance* terdiri dari beberapa aspek yang ada didalamnya di antaranya adalah pelayanan publik, sistem informasi desa (Santoso et al., 2019). *Smart Governance* yang di implementasikan melalui penggunaan *website* desa sebagai media pelayanan publik atau pusat informasi. Dan juga dengan menggunakan media sosial *Whatsapp* dalam proses pelayanan publik berupa permohonan dalam pengajuan berkas administrasi. Penggunaan aplikasi *Whatsapp* sebagai platfrom pengajuan permohonan pelayanan publik, karena aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat khususnya di Desa Limpung. Tujuanya sendiri supaya masyarakat sudah paham dan mengerti proses pelayanan publik secara digital.

Gambar 1.2 Website Desa Limpung



Sumber: <https://limpung.desa.id>. Di akses pada 20 Mei 2025

Meskipun Desa Limpung telah memiliki platform digital berupa website resmi (limpung.desa.id) yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang profil desa, pelayanan publik, potensi desa, hingga dokumen keuangan, namun implementasi elemen *Smart Village* di bidang *Smart Economy* dan *Smart Environment* masih menghadapi sejumlah tantangan. Website tersebut sejatinya menjadi wajah digital desa, sebagai bentuk perwujudan digitalisasi pelayanan dan transparansi informasi. Akan tetapi belum semua potensi desa mampu terangkat melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.

Gambar 1.3 Emping Melinjo sebagai Komoditas Lokal Desa Limpung



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 20 Mei 2025

Seperti salah satunya dalam pengelolaan komoditas lokal utama Desa Limpung, yaitu emping melinjo. Produk ini merupakan ciri khas yang memiliki nilai jual tinggi dan potensi untuk menjadi unggulan ekonomi desa. Sayangnya, pengelolaan dan pemasaran emping melinjo masih dilakukan secara konvensional, tanpa pendekatan berbasis digital atau integrasi dengan platform *e-commerce*. Padahal, melalui konsep *One Village One Product* (OVOP) yang merupakan bagian dari pendekatan *Smart Economy*, seharusnya desa mampu mengembangkan branding produk lokal secara lebih inovatif, memperluas pasar melalui digital marketing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Di sisi lain pada pengembangan *Smart Environment* di Desa Limpung telah menunjukkan kemajuan melalui penerapan sistem pembuangan limbah industri yang ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah terpadu. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen pemerintah desa dalam menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat. Meski demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara aktif masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui kegiatan edukatif dan program berbasis partisipasi seperti bank sampah, daur ulang, atau urban farming.

Selain itu, integrasi antara *Smart Economy* dan *Smart Environment* belum sepenuhnya dilakukan. Seperti masih belum ada upaya yang signifikan untuk mengolah limbah industri menjadi produk bernilai ekonomis, atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi emping melinjo agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Padahal, penggabungan aspek lingkungan dan ekonomi dapat menjadi strategi penting untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 1.4 Trotoar sebagai hasil *Smart Mobilty*



Sumber: Dokumentasi Pribadi pada, 20 Mei 2025

Pembangunan trotoar tersebut merupakan program pembangunan kerjasama antara pemerintah Desa Limpung dan Pemerintah Kecamatan Limpung. Dilakukanya pembangunan ini sebagai upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan masyarakat dengan berjalan kaki.

Gambar 1.5 Area Terbuka Hijau di Alun-Alun Limpung



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 20 Mei 2025

Selain itu untuk *smart tourism*, pemerintah Desa Limpung melakukan promosi wisata *street food* yang ada di Alun-alun Limpung. Alun-alun ini merupakan tempat relokasi dan juga integrasi pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil menengah (UKM). Dengan mempromosikan menggunakan media sosial melalui program *visit Batang 2022*. Renovasi di Alun-alun Limpung merupakan

langkah pemerintah untuk keindahan, kenyamanan, dan juga ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Selain itu bertujuan untuk mendukung tahun kunjungan wisata dengan tagline *Heafen of Asia*.

Desa Limpung sebagai desa administratif di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, juga menjadi salah satu desa yang menjalankan implementasi Program *Smart Village*. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan perangkat desa, implementasi program ini telah dimulai sejak tahun 2018 yang merujuk pada regulasi tingkat kabupaten. Tetapi hingga saat ini program tersebut belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Permasalahan utama yang di temukan adalah tidaknya terdapat inovasi pelayanan yang khas yang membedakan Desa Limpung dengan desa lainya. Dimana program ini yang di jalankan hanya mencakup penggunaan *WhatsApp* secara informal sebagai media komunikasi antar warga dan perangkat desa, tanpa adanya platform layanan digital terintegrasi. Hal ini sangat berbeda dengan desa lain seperti Desa Kali Salak yangh telah mengembangkan aplikasi pelayanan adminstrasi berbasis *Android* untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.

Pada aspek dokumentasi program ini juga menjadi perhatian utama, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan, di sebutkan bahwa proses monitoring memang di lakaukan, akantetapi tidak terdapat laporan tertulis atau bentuk pelaporan progress terdokumentasi dengan baik. Seharusnya dalam onsep *Evidance Baed Policy* dokumentasi menjadi landasan penting untuk melakukan evaluasi program dan juga pengambilan keputusan selanjutnya. Ketiadaan laporan atau basis data yang memadai ini menyebabkan pelaksanaan program ini tidak dapat di evaluasi secara objektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program cenderung bersifat normative dan formalitas tanpa di tunjang oleh sistem pendokumentasian dan juga pelaporan yang sistematis.

Masalah lainya yang juga cukup mencolok adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program *Smart Village*. Dari hasil wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Limpung, di dapatkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengetahui konsep *Smart Village* dan tidak merasakan manfaat secara langsung dari program tersebut. Bahkan masih banyak warga yang menganggap bahwa

pelayanan digital tidak tersedia dan mereka tetap memilih datang secara langsung ke kantor kelurahan untuk mengurus keperluan administrative. Dimana temuan ini menunjukkan adanya sebuah kesenjangan komunikasi dan juga minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam kegiatan yang berbasis ekonomi digital seperti pemasaran daring, *e-commerce*, atau partisipasi masyarakat dalam program *OVOP* yang seharusnya menjadi bagian dari pengembangan *Smart Village*.

Di sisi lain tata kelola anggaran implementasi Program *Smart Village* juga di hadapkan kepada kendala yang serius. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Sekeretaris desa, dan juga Bendahara desa di ketahui bahwa tidak terdapat pos anggaran khusus yang secara eksplisit dialokasikan untuk pelaksanaan program *Smart Village*, baik dalam konteks pengadaan perangkat teknologi maupun pelatihan SDM. Selain itu masyarakat juga tidak pernah memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran program ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih belum optimal dan masih minimnya transparansi yang berpotensi menghambat efektivitas program serta menciderai prinsip akuntabilitas publik yang seharusnya di junjung dalam setiap implementasi kebijakan.

Program *Smart Village* juga di rancang untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi lokal. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi belum di manfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Desa Limpung. Pelaku UMKM seperti penjahit rumahan, pengrajin emping melinjo, dan pedagang kecil masih menggunakan pola pemasaran konvensional dan belum tersentuh pelatihan digital marketing atau pendampingan untuk memperluas jangkauan usaha mereka secara daring. Pemerintah desa juga belum menyediakan platform, *website*, dan juga media digital lainnya yang dapat di akses para pelaku ekonomi lokal merupakan pilar penting dalam pencapaian desa pintar yang inklusif dan berbasis potensi masyarakat.

Meskipun Program *Smart Village* telah dicanangkan di Desa Limpung, namun pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah kurangnya komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan antara

pemerintah desa dan masyarakat. Sosialisasi program hanya dilakukan sekali di awal, tanpa ada upaya tindak lanjut yang terstruktur. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak memahami secara menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan cara terlibat dalam program tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat.

Selain itu keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan nyata. Hanya segelintir perangkat desa yang memiliki pemahaman tentang konsep *Smart Village*, sementara sebagian besar masyarakat belum teredukasi dengan baik. Pendanaan program yang berasal dari dana desa pun belum dialokasikan secara optimal, dengan tidak adanya rincian anggaran yang transparan. Di sisi infrastruktur, meskipun jaringan internet sudah tersedia, pemanfaatannya untuk mendukung inovasi desa masih sangat minim.

Struktur organisasi dan sistem kerja dalam pelaksanaan program juga belum berjalan secara sistematis. Desa Limpung belum memiliki prosedur operasional tetap (SOP) untuk menjalankan program ini. Proses monitoring dan evaluasi pun tidak terdokumentasikan secara resmi, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai dan apa saja hambatan yang dihadapi. Semua aktivitas lebih banyak dilakukan secara informal, tanpa kerangka kerja yang jelas.

Yang terakhir yaitu sikap masyarakat dan keterlibatan mereka dalam kegiatan desa yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi digital maupun pelestarian lingkungan masih rendah. Tidak ada inovasi khusus dari pemerintah desa untuk mengembangkan program secara kreatif, sementara masyarakat belum diberdayakan secara maksimal untuk terlibat aktif, baik dalam produksi lokal seperti emping melinjo, maupun dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan potensi desa.

Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada keberhasilan implementasi program *Smart Village*. Implementasi yang berhasil akan tercapai jika semua faktor ini dapat dioptimalkan dengan baik, baik dari sisi komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, koordinasi birokrasi yang jelas, maupun sikap dan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana faktor-faktor tersebut diterapkan

dalam implementasi Program *Smart Village* dan mengidentifikasi masalah yang menghambat pencapaian tujuan program tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Program *Smart Village* di Desa Limpung telah diinisiasi sebagai upaya pengembangan desa berbasis teknologi dan bukti, akan tetapi didalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tidak adanya inovasi khusus yang dikembangkan oleh pemerintah desa, kurangnya dokumentasi progres program, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta keterbatasan alokasi anggaran menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan program. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam pengembangan ekonomi lokal juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, identifikasi masalah berikut ini disusun untuk memperjelas permasalahan yang ada dan menjadi dasar bagi penelitian ini.

Identifikasi Masalah:

1. Belum optimalnya penggunaan data dan bukti lokal dalam pengambilan keputusan program *Smart Village*, sehingga kegiatan sering dilakukan tanpa dasar kebutuhan masyarakat yang terukur.
2. Dokumentasi dan pelaporan program belum sistematis, sehingga bukti yang seharusnya digunakan untuk evaluasi dan perencanaan belum tersedia.
3. Kapasitas organisasi desa dalam mengakses dan mengelola informasi berbasis data masih terbatas, termasuk dalam hal digitalisasi pelayanan publik.
4. Kepemimpinan dan budaya kerja berbasis bukti belum terbentuk, sebagian besar kebijakan bersifat *top-down* dan normatif.
5. Koordinasi dan jejaring antar aktor (pemerintah desa, warga, dan mitra eksternal) belum mendukung terciptanya sistem kebijakan berbasis bukti yang kuat di desa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah

1. Implementasi Program *Smart Village* Berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan bukti dalam implementasi program *Smart Village* di Desa Limpung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Program *Smart Village* Berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan bukti dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Desa Limpung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan mengacu pada teori Nutley et al. (2007), penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan empat dimensi utama ketersediaan dan kualitas bukti (*evidence*), kapasitas organisasi (*organizational capacity*), kepemimpinan dan budaya kerja (*leadership and culture*), serta hubungan antar aktor (*linkages and relationships*) dalam konteks pelaksanaan program publik di tingkat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya yang mengkaji pemanfaatan data dan bukti dalam proses implementasi kebijakan di level lokal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program *Smart Village*, khususnya:

1. Pemerintah Desa Limpung

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program *Smart Village* dengan menekankan penggunaan data dan bukti lokal dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu mendorong penguatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola informasi berbasis bukti, memperbaiki sistem dokumentasi, serta membangun budaya kerja yang lebih partisipatif dan transparan.

2. Pemerintah Kabupaten Batang

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan pendampingan dan pengawasan implementasi program *Smart Village* yang berbasis bukti. Hasil temuan ini dapat digunakan untuk merancang program pelatihan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan penguatan hubungan antar aktor untuk mendorong replikasi kebijakan berbasis data di desa-desa lain.

3. Peneliti dan Praktisi Lainnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti dan praktisi yang tertarik pada topik serupa, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan desa pintar di wilayah lain.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Publikasi)	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Siti Khaerunisa, Udin Syamsudin, Muhamad Ibrahim Rantau (2024)	Implementasi <i>Smart Village</i> dalam Mewujudkan Desa Digital di Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan Kibupaten Tangerang.	Menganalisis implementasi <i>Smart Village</i> dalam mewujudkan desa digital.	Studi Kasus	Tantangan dalam literasi digital dan keterbatasan sosialisasi teknologi, meskipun terjadi perubahan pada layanan publik melalui aplikasi SimpelDesa.
Putiri, A., Rahayu, D., Dwisnu, E. (2024)	Program <i>Smart Village</i> : Tantangan Implementasi di Era Digitalisasi.	Mengidentifikasi tantangan implementasi program <i>smart village</i> di era digitalisasi.	Studi Pustaka	Ditemukan kendala waktu, anggaran, dan penyesuaian budaya lokal dalam implementasi.
Oktaviana, R. N. (2024)	Implementasi <i>Smart Village</i> di Desa Pangandaran.	Mengetahui implementasi <i>Smart Village</i> di Desa Pangandaran.	Studi Kasus	Implementasi terlihat dari teknologi, fasilitas pendukung, dan keterhubungan antar wilayah melalui <i>Smart Village</i> Nusantara.
Indri Islamiati. (2024)	Pengaruh <i>Good Governance</i> Desa terhadap <i>Smart Village</i> Indonesia	Menganalisis dampak tata kelola pemerintah desa (<i>good governance</i>) terhadap pengembangan <i>Smart Village</i> di Indonesia.	Kuantitatif dengan metode <i>Principal Component Analysis</i> dan pemetaan indeks <i>Smart Village</i> antar provinsi	Ditemukan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan <i>Smart Village</i> . Namun terdapat disparitas antar provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, kendala geografis, ketahanan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, tingkat partisipasi masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan dukungan terhadap konsep <i>Smart Village</i> .

Ananda Haniyuhana, Agus Widiyarta (2023)	Penerapan <i>Evidence Based Policy</i> Dalam Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Limpung	Menganalisis keberhasilan penerapan <i>evidence based policy</i> dalam implementasi program <i>smart village</i> .	Kualitatif Studi Kasus	Keberhasilan digitalisasi layanan publik di Desa Limpung melalui penggunaan <i>WhatsApp</i> dan <i>website</i> desa.
Chowdury, Ullah, Sulaiman (2023)	<i>The Role of Digital Agriculture in Transforming Rural Areas into Smart Villlage</i>	Mengidentifikasi peran pertanian digital dalam mengubah pedesaan menjadi desa pintar.	Studi Literatur	Pertanian digital mempercepat transformasi pedesaan menjadi desa pintar di Negara berkembang.
Julnarta , S. (2023)	Pola Komunikasi Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan <i>Smart Village</i>	Mengkaji pola komunikasi pemberdayaan pemerintah desa dalam mewujudkan <i>Smart Village</i> .	Deskriptif Kualitatif	Tiga elemen <i>Smart Village</i> (government, community, environment) harus terhubung melalui komunikasi yang baik.
Alhari et al. (2022)	<i>Meta Analysis Syistematic Review: A Strategy and Dimension to Achieve of Smart Village Concept</i>	Mengidentifikasi strategi dan dimensi dalam pencapaian konsep <i>Smart Village</i> .	Meta-analisis Sistematis (PRISMA)	Infrastruktur digital, pendidikan dan partisipasi masyarakat merupakan pondasi dari konsep <i>Smart Village</i> .
Degada, Thapliyal, Mohanty (2021)	<i>Smart Village: An IoT Based Digital Transformation</i>	Mengkaji peran teknologi <i>IoT</i> dalam transformasi desa menjadi <i>Smart Village</i> .	Studi Literatur	<i>IoT</i> meningkatkan efisiensi sumber daya desa dan kualitas hidup masyarakat.
Herdiana, D. (2019)	Kolaborasi Aktor Hiptahelix dalam pengembangan Pariwisata Berbasis <i>Smart Village</i>	Menganalisis kolaborasi aktor dalam pengembangan pariwisata berbasis <i>Smart Village</i> .	Kualitatif	Kolaborasi antar aktor penting, namun sosialisasi program masih terbatas.

Penelitian Ananda Haniyuhana dan Agus Widiyarta (2023) serta Mohammad Raziudin Chowdury et al. (2023) lebih banyak membahas aspek teknis dalam penerapan teknologi digital di lingkungan desa, sementara penelitian ini berfokus pada pendekatan kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy) dalam implementasi program *Smart Village* di Desa Limpung.

Julnarta, S. (2023) menyoroti aspek partisipasi masyarakat dalam program berbasis teknologi, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Penelitian Alhari et al. (2022) menelaah keberhasilan program *Smart Village* dari sisi evaluasi hasil, sedangkan penelitian ini mengupas aspek proses implementasi kebijakan.

Selanjutnya, penelitian oleh Amit Degada et al. (2021) menyoroti pemanfaatan teknologi *IoT* dalam mendukung konsep *Smart Village*, sementara penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan berbasis bukti dalam konteks lokal Desa Limpung. Sementara itu, penelitian Siti Khaerunisa et al. (2024) menitikberatkan pada tantangan literasi digital dalam program *Smart Village*, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif dengan mengkaji implementasi program secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian Indri Islamiati (2024) lebih memfokuskan pada pengaruh tata kelola pemerintahan (good governance) terhadap pengembangan *Smart Village*, sementara penelitian ini mengkaji keterkaitan kebijakan berbasis bukti dengan keberhasilan program *Smart Village*. Penelitian Oktaviana (2024) lebih menitikberatkan pada implementasi teknologi dan fasilitas pendukung, sedangkan penelitian ini mengkaji faktor implementasi dan penghambat secara mendalam.

Penelitian Putri, Rahayu, dan Dwisnu (2024) mengidentifikasi tantangan implementasi program *Smart Village* pada era digitalisasi, seperti masalah anggaran dan waktu, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kendala teknis dan non-teknis dalam proses implementasi. Adapun penelitian Herdiana (2019) menelaah kolaborasi aktor dalam pengembangan pariwisata berbasis *Smart*

Village, sementara penelitian ini lebih menekankan pada peran kebijakan dan implementasi digitalisasi layanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menerapkan pendekatan baru dalam mengkaji program *Smart Village* dengan menggunakan perspektif kebijakan berbasis bukti, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi secara lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan juga mengelola (*manage*) keputusan dalam publik. Menurut Harbani Paslong (2014 :8), berpendapat bahwa Administrasi Publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut McCurdy dalam Keban (2014 :3), menerangkan bahwa Administrasi Publik dapat dipandang sebagai sebuah proses politik, ia mendefinisikan Administrasi Publik sebagai metode pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi negara. McCurdy berpendapat bahwa Administrasi Publik tidak hanya melibatkan unsur manajerial tetapi juga aspek politik. (Tjokroamidjojo, 1978), menyampaikan bahwa administrasi publik adalah ilmu mengenai kerja sama pada individu untuk mencapai sebuah tujuan yang ditentukan.

Sedangkan menurut pendapat Woordow Wilson, administrasi publik adalah proses pelaksanaan sebagai aspek yang mencakup semua urusan publik, yang artinya selain unsur pemerintahan, seperti organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, dan juga lembaga bisnis berperan juga didalam pengelolaan urusan publik. Karena ketiga aspek tersebut mempunyai dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat (Hidayat, 2007:22). C. T. Goodsel juga berpendapat, bahwa administrasi publik adalah upaya guna mencapai demokrasi serta memenangkan hati masyarakat. Maka dari itu semua

pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam penyediaan pelayanan publik dan daya saing yang terintegrasi dengan nilai-nilai efektivitas, legitimasi, efisiensi, keadilan, transparansi, dan juga ketergantungan.

Beberapa ahli lain juga mendefinisikan administrasi publik, seperti Rosenbloom mendefinisikan bahwa administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang didalamnya terdapat pemanfaatan teori manajemen, politik, dan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan publik secara menyeluruh. Lalu menurut Barton & Chappel, mereka mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah cara kerja dari pemerintah. Berdasarkan pendapat dari para ahli yang sudah di jelaskan di atas, disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang di lakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik.

1.5.3 Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah di susun secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Mulainya dilakukan implementasi apabila seluruh perencanaan sudah di anggap sempurna dan siap. Implementasi menurut Guntur Setiawan, ia berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya sertamemerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program di laksanakan.

Menurut teori Jhones (Mulyadi, 2015:45), yaitu *Those Activities directed toward putting a program into effect* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Horn dan Mater juga mengemukakan, *Those action by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang di lakukan pemerintah). Maka implementasi adalah suatu tindakan yang di lakukan setelah suatu kebijakan di tetapkan. Implementasi di lakukan merupakan cara supaya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Selanjutnya Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), berpendapat bahwa sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh baik individu-individu atau pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136), mengartikan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian implementasi adalah merupakan suatu proses yang juga berkaitan dengan kebijakan dan juga program yang akan di terapkan oleh suatu organisasi atau institusi. Khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan juga menyertakan sarana prasarana untuk mendukung berjalanya program.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu program yang menyertakan saran prasarana yang di buat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan juga mendukungnya. Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan dari beberapa ahli seperti:

1. Menurut (Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014:125), menyatakan sebagai suatu program yang di proyeksi dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (a projectted program of gools, value, and praktives).
2. Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.
3. Menurut Anderson (Tahir, 2014:21). Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.
4. Kemudian menurut Mulyadi (2015:37). Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.
5. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan

peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi, Mulyadi (2015:37).

6. Menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Model-model implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti dibawah ini:

1. Model Edward III

George Edward III (dalam Elake Nataniel 2015) mengemukakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementaion. Ia berkata, without effective implementacion the deccion of policy makers will not be carried out successfully*. Eedward mengaskan untuk memperhatikan empat isu pokok implementasi kebijakan agar menjadi efektif, yaitu *communication, resurce, dispotiton or attitudes and bureaucratic structures*.

2. Model Hogwood

Gunn Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), menerangkan untuk dapat mengimplementasikan kenijakansecara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu merupakan: a) Kondisi eksternal yang di hadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan ataupun kendala yang serius, b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai, c) Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar memadai, d) Kebijakan yang akan di emplementasikan didasari oleh suatu hubungan kasualitas yang andal, e) Hubungan kasualitas bersifat langsung dan hanya sedikit

mata rantai penghubungnya, f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

3. Model Smith

Smith berpendapat, dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu di perhatikan. Dimana ke empat variable dalam implementasi kebijakan tersebut di tampilkan dengan jelas yaitu, Tacjhan (dalam Wattimena Pieter 2016).

- 1) Kebijakan yang di idealkan (idealized policy) yaitu pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk di induksikan.
- 2) Kelompok sasaran target group) dimana mereka (orang-orang) yang paling langsung di pengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumusan kebijakan.
- 3) *Implementating organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- 4) *Enfiromental factor*, unsur-unsur dalam lingkungan yang memepengaruhi atau di pengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

4. Model Van Meter dan Horn Model

Van Metter dan Van Horn (1975) merupakan model yang paling klasik, dimana model mengandaikan bahwasanya implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

5. Model Mazmanian dan Sabatie

Mazmanian dan Sabtier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable yaitu:

1) Variable Independen

Mudah tidaknya masalah di kendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki.

2) Variable Intervening

Variable ini di artikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakanya teori kasual, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksan dari pihak luar. Variable di luar kebijakan yang memepengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosioekonomi dan juga teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pelaksana.

3) Variable Dependen

Yaitu, tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan yang terdiri dar: pertama, pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelkasan. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke empat, penerimaan atas hasil nyata. Yang ke lima, yaitu tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang di buat dan dilaksanakan, baik sebagian ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Dari pengertian kebijakan publik yang di jelaskan oleh beberapa para ahli di atas dan beberapa model-model implementasi menurut para ahlinya, maka dapat kita ketahui, bahwa kebijakan publik di buat oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang berupa tindakan-tindakan dari pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Kebijakan publik adalah pemilihan opsi alternatif untuk dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

1.5.5 *Evidence Based Policy*

Evidence Based Policy merupakan konsep yang terus berkembang, sejarah mengungkapkan bahwasanya konsep ini terus populer ketika Tony Blair terpilih menjadi perdana menteri Inggris tahun 1997, pemerintahan Blair mengemukakan wacananya dengan menggambarkan kebijakan publik yang baik perlu dilandasi dengan bukti-bukti yang ilmiah dan terpercaya (Dendy Raditya 2020)

Teori *evidence-based policy* menurut Nutley, Walter, and Davies (2007) dalam bukunya *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*, menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi utama yang mempengaruhi efektivitas penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu: *evidence, organizational capacity, leadership and culture, serta linkages and relationships*. Dalam bukunya tersebut, Nutley dan rekan-rekannya menyatakan bahwa: “*Organizational capacity is central to whether and how research is used in practice. It affects the ability to access, interpret, and apply evidence in meaningful ways.*”

Artinya, kapasitas organisasi menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah dan sejauh mana hasil penelitian atau bukti dapat digunakan secara efektif dalam praktik. Kemampuan suatu organisasi dalam mengakses, memahami, dan menerapkan bukti sangat ditentukan oleh kekuatan internalnya, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan struktur institusi.

Penerapan kebijakan berbasis bukti atau *Evidence Based Policy* di dalam sistem perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangatlah penting. *Evidence Based Policy* sangat perlu di karenakan dapat di lihat dari segi efektivitas, efisiensi, orientasi layanan publik, akuntabilitas, demokratisasi dan kepercayaan, Sudarno (2018). Analisis berbasis bukti yang sistematis merupakan unsur yang sangat penting dalam semua pembuatan perencanaan yang baik. Berbagai data perlu di lakukan untuk menghasilkan sebuah analisis dan juga bukti yang di perlukan oleh pemerintah dalam memahami dengan benar apakah suatu kebijakan dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai dengan rencana. Apakah suatu pelayanan telah di berikan dengan secara efektif sehingga bukti yang seharusnya dapat di gunakan untuk mendukung dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu menurut para ahli *evidence based policy* adalah kebijakan yang di dasarkan pada penelitian dan juga informasi terbaik untuk memandu suatu keputusan kebijakan seperti yang di kemukakan oleh Beerkens, (2018), *Evidence Based Policy* merupakan serangkaian metode yang menginformasikan proses kebijakan yang tidak bertujuan secara langsung mempengaruhi tujuan akhir kebijakan tersebut. Hal serupa juga di kemukakan oleh (Cairney & Oliver 2017), *Evidence Based Policy* adalah kebijakan yang menggunakan penelitian dari informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan.

1. Menurut Nutley, Walter, dan Davies (2007), evidence-based policy adalah proses penggunaan bukti yang sistematis untuk mendukung, membentuk, dan mengevaluasi kebijakan publik. Tujuannya adalah agar keputusan kebijakan tidak hanya berdasarkan intuisi, tradisi, atau tekanan politik, tetapi juga berdasarkan data, penelitian, dan evaluasi yang valid.
2. The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation, mereka berpendapat bahwa kebijakan berbasis bukti untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan.

3. Sutcliffe dan Court mengemukakan kebijakan berbasis bukti adalah serangkaian metode yang menginformasikan proses kebijakan dengan pendekatan yang lebih rasional, ketat, dan sistematis.
4. Menurut Smeru kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebijakan adalah bukti yang tepat waktu, memiliki pesan yang jelas, dan relevan kebijakan.
5. Urban Institute mengartikan kebijakan berbasis data dapat mengambil banyak bentuk, seperti menggunakan temuan penelitian untuk menginformasikan kebijakan baru.

Dari pendapat para ahli di atas mengenai arti kebijakan yang di kemukakanya, kita dapat menyimpulkan kebijakan berbasis bukti sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Membantu untuk memahami sebuah kebijakan karena sangat terinformasikan mengenai keputusan dalam penyusunan kebijakan, program, dan juga proyek dengan menempatkan data terbaik.

1.5.6 *Smart Village*

Smart Village merupakan konsep pembangunan desa berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konsep ini, desa tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi yang memberdayakan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. *Smart Village* dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan desa, seperti keterbatasan akses informasi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kualitas layanan publik. Dengan adanya teknologi, desa dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, sehingga tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Selain itu, konsep ini juga mendukung pemerataan pembangunan dengan memastikan bahwa masyarakat desa dapat memperoleh layanan yang setara dengan masyarakat perkotaan.

Menurut European Network for Rural Development (2018), *Smart Village* didefinisikan sebagai desa yang dibangun dengan memanfaatkan kekuatan dan aset yang dimilikinya, serta secara bersamaan mengembangkan peluang baru dengan memanfaatkan teknologi digital dan komunikasi. Penerapan teknologi ini memungkinkan desa untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik agar lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, teknologi menjadi faktor utama dalam mendukung keberlanjutan desa yang mandiri dan inovatif. Desa yang menerapkan konsep *Smart Village* tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Dalam implementasinya, desa perlu memiliki strategi yang jelas dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital.

Pendekatan *Smart Village* juga ditekankan oleh Ramachandra et al. (2015), yang menjelaskan bahwa desa pintar adalah desa yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak eksternal. Kemandirian ini dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat desa, khususnya generasi muda, untuk mengoptimalkan sumber daya alam lokal dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan kata lain, desa tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau pihak swasta, tetapi juga mampu mengembangkan solusi lokal yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan bagi desa-desa di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, sehingga pendekatan berbasis potensi lokal menjadi lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat seragam.

Santoso et al. (2019), juga menekankan bahwa pengembangan *Smart Village* sangat bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam era digital, akses terhadap internet dan teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki literasi digital yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan berbasis teknologi dengan optimal. Selain itu, *Smart Village* juga dapat

menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan desa, program pembangunan, serta layanan administratif lainnya.

Menurut Viswandham dan Vedula (2010), *Smart Village* dapat diartikan sebagai desa yang menyediakan berbagai layanan publik, seperti layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Konsep ini memungkinkan desa untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam praktiknya, teknologi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti sistem pengaduan masyarakat berbasis *online*, layanan *e-administration*, serta pemantauan infrastruktur desa melalui *Internet of Things* (IoT). Pemanfaatan teknologi ini juga dapat meningkatkan daya saing desa dalam sektor ekonomi, terutama dalam pemasaran produk lokal melalui platform digital.

Sementara itu, Chatterjee dan Kar (2017) mengungkapkan bahwa *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan publik berbasis teknologi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang ramah bagi dunia usaha dan ekonomi lokal. Desa yang menerapkan konsep ini mampu menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Salah satu contohnya adalah pengembangan *e-commerce* untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Dengan adanya teknologi, masyarakat desa dapat lebih mudah memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat agar dapat bersaing dalam ekonomi digital.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa *Smart Village* merupakan pendekatan pembangunan desa yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknologi, tetapi juga pada

pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Dalam implementasinya, *Smart Village* memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi ini, desa dapat lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

1.5.7 Hubungan *Evidence Based Policy* Terhadap *Smart Village*

Penelitian ini dilandasi oleh kerangka pikir bahwa implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks Program *Smart Village*, tidak hanya dapat dilihat dari sisi prosedural dan formal, tetapi juga harus dianalisis melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan bukti yang valid dan dapat diverifikasi dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, penggunaan pendekatan berbasis bukti menjadi esensial untuk memastikan bahwa implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi faktual masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, *evidence-based policy* tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga kerangka analitis yang dioperasionalkan melalui empat dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Nutley, Walter, dan Davies (2007), yaitu: (1) *evidence*, (2) *organizational capacity*, (3) *leadership and organizational culture*, serta (4) *linkages and relationships*. Dimensi pertama melihat sejauh mana pengambilan keputusan didasarkan pada data sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dimensi kedua berkaitan dengan kapasitas internal pemerintah desa, seperti literasi digital perangkat desa dan infrastruktur teknologi. Dimensi ketiga menekankan budaya kerja reflektif dan komitmen pemimpin terhadap penggunaan bukti. Sedangkan dimensi keempat menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan dan menggunakan data secara efektif.

Program *Smart Village* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2019 memuat enam domain utama pembangunan desa berbasis digital, yaitu: *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Keenam domain tersebut menjadi instrumen kebijakan yang dapat dikaji lebih dalam melalui pendekatan *evidence-based policy*. Artinya, implementasi tiap domain tidak hanya dilihat dari keberadaan program secara fisik atau administratif, tetapi dari seberapa jauh program tersebut dirancang dan dilaksanakan berdasarkan bukti, kapasitas internal, komitmen pemimpin, dan jejaring antaraktor.

Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian tidak hanya menggambarkan capaian program *Smart Village* secara deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian analitis terhadap kualitas implementasi kebijakan berdasarkan prinsip *evidence-based policy*. Dengan demikian, hubungan antara *evidence-based policy* dan *Smart Village* dalam penelitian ini terletak pada cara pandang bahwa efektivitas pelaksanaan *Smart Village* sangat ditentukan oleh sejauh mana proses kebijakan yang mendasarinya dijalankan secara berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal.

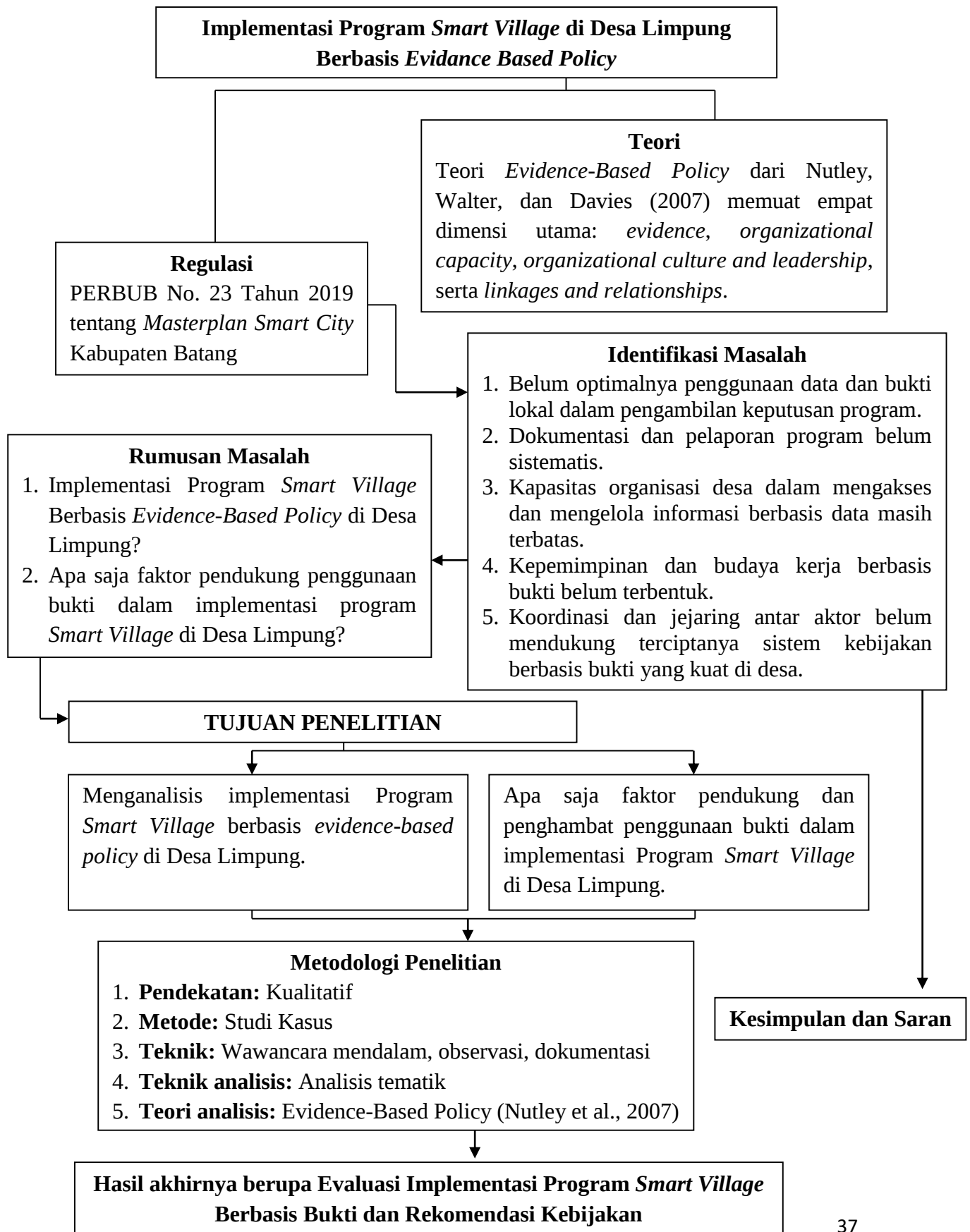
1.6 Operasional Konsep

Penelitian ini mengoperasionalkan konsep *Evidence-Based Policy* sebagaimana dikemukakan oleh Nutley et al. (2007) untuk menganalisis implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung melalui empat dimensi utama: *evidence*, *organizational capacity*, *leadership and organizational culture*, serta *linkages and relationships*. Selain itu, implementasi program juga dianalisis berdasarkan enam domain *Smart Village* yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang No. 23 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* dan *Smart Village*. Operasionalisasi konsep disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1.6 Operasional Kosep

Fenomena	Sub-Fenomena	Operasional
Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Limpung Berbasis <i>Evidence Based Policy</i>	1. <i>Evidence</i>	1. Ketersediaan dan kualitas data sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
	2. <i>Organizational Capacity</i>	2. Kemampuan perangkat desa dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi berbasis bukti; tersedianya infrastruktur dan SDM pendukung.
	3. <i>Leadership and Culture</i>	3. Komitmen kepala desa dan perangkat dalam membangun budaya kerja berbasis data dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
	4. <i>Linkages and Relationships</i>	4. Keterlibatan dan kerja sama antara pemerintah desa, warga, dinas terkait, akademisi, dan mitra eksternal dalam pelaksanaan dan evaluasi program.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Limpung Berbasis <i>Evidence Based Policy</i>	1. Ketersediaan bukti yang valid	1. Adanya Perbup No. 23 Tahun 2019 sebagai arahan kebijakan dan dasar hukum pelaksanaan <i>Smart Village</i> berbasis data.
	2. Kapasitas perangkat desa	2. Tingkat literasi digital, kemampuan teknis perangkat desa, dan ketersediaan pelatihan sebagai pendukung atau hambatan implementasi berbasis bukti.
	3. Budaya kerja berbasis data	3. Kebiasaan kerja yang mendukung transparansi, evaluasi, dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan desa.
	4. Sistem dokumentasi	4. Tidak tersedianya laporan program yang terstruktur dan minimnya data progres sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.
	5. Infrastruktur digital terbatas	5. Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan akses teknologi yang membatasi penggunaan data secara optimal.
	6. Koordinasi lintas aktor	6. Minimnya kolaborasi antara desa, OPD, warga, dan mitra akademik dalam mendukung praktik kebijakan berbasis bukti.

1.6.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi program *Smart Village* berbasis *Evidence Based Policy* di Desa Limpung, Kabupaten Batang. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dan mendapatkan pemahaman holistik mengenai kondisi yang ada di lapangan.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini terletak di Desa Limpung, yang berada di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa Limpung dipilih karena sedang mengimplementasikan program *Smart Village*, yang sesuai dengan fokus penelitian ini mengenai keberhasilan dan hambatan dalam implementasi program berbasis teknologi dan kebijakan berbasis bukti.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi program *Smart Village* di Desa Limpung, yang antara lain adalah:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi program di desa.
2. Kasi Pemerintahan sebagai pengelola administrasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan desa.
3. Masyarakat Desa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam program *Smart Village*.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang mencakup:

1. Data primer: yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat dalam program.
2. Data sekunder: berupa dokumen-dokumen pendukung terkait dengan regulasi dan pelaksanaan program *Smart Village*, seperti laporan kegiatan dan kebijakan pemerintah setempat.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa yang Bertanggung Jawab dalam Implementasi Program *Smart Village*:
 - 1) Kepala Desa: yang memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan dan pengarahan kebijakan.
 - 2) Kasi Pemerintahan: yang terlibat dalam administrasi dan pelaksanaan kebijakan program.
 - 3) Kasi Pembangunan: yang bertanggung jawab atas aspek fisik dan infrastruktur dalam program *Smart Village*.
2. Masyarakat Desa Lempung: yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh implementasi program.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam: dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat untuk menggali informasi mengenai implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program *Smart Village*.
2. Observasi Partisipatif: untuk memahami dinamika pelaksanaan program di lapangan dan bagaimana masyarakat serta perangkat desa terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan program *Smart Village*.
3. Studi Dokumentasi: menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan data terkait yang relevan dengan implementasi program *Smart Village*.

1.7.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini mencakup pengorganisasian data kualitatif dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, untuk mengidentifikasi pokok pembahasan utama yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data berdasarkan pola-pola makna yang muncul secara konsisten dan signifikan.

Dalam penelitian ini, proses analisis dan interpretasi data akan diarahkan berdasarkan kerangka teori Nutley, Walter, dan Davies (2007) mengenai implementasi kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy). Teori ini mengidentifikasi empat dimensi utama dalam penerapan kebijakan berbasis bukti, yaitu:

1. *Evidence* (Bukti Valid): Mengkaji sejauh mana data dan informasi yang digunakan dalam implementasi program benar-benar relevan, akurat, dan diperoleh dari sumber yang kredibel seperti riset lokal atau musyawarah warga.

2. *Organizational Capacity* (Kapasitas Organisasi): Menilai kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem pendukung yang digunakan dalam menjalankan program *Smart Village*.
3. *Organizational Culture and Leadership* (Budaya Organisasi dan Kepemimpinan): Menganalisis komitmen dan peran pemimpin desa dalam membangun budaya kerja berbasis bukti dan inovasi.
4. *Linkages and Relationships* (Hubungan dan Jejaring): Mengkaji keterlibatan dan sinergi antara pemerintah desa, BPD, dinas terkait, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung implementasi program.

1.7.8 Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas data dalam penelitian ini, akan diterapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Keabsahan (validitas): Data yang diperoleh akan diverifikasi melalui teknik triangulasi, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.
2. Keandalan (reliabilitas): Peneliti akan menjaga konsistensi dalam pengumpulan dan analisis data, serta melakukan pengecekan ulang terhadap temuan yang diperoleh.
3. Kredibilitas: Data yang dikumpulkan akan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu perangkat desa yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.